



# Buletin Parlementaria

Nomor 1159/III/VII/2021 • Juli 2021

## DPR Setujui RUU Otsus Papua Menjadi UU



**3** Penegakan PPKM  
Darurat Harus  
Persuasif



**5** Rachmat Gobel  
Dukung Pembangunan  
Big Data Setjen DPR



9 772614 339005



BULETIN

# DPR Setujui RUU Otsus Papua Menjadi UU



Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun saat menyampaikan laporan pembahasan RUU Otsus Papua kepada Pimpinan DPR RI di Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/Man

**D**PR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat di setujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian diikuti ketukan palu pengesahan pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7).

Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun dalam laporannya mengatakan, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU ini. Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah yang memuat materi mengenai dana Otsus Papua,

sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan, ditambah 2 pasal substansi materi di luar UU.

Komarudin mengatakan RUU Otsus Papua mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan pembinaan masyarakat adat.

“Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU,” paparnya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, RUU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP. Dalam bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, pada pasal 38 telah

menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan OAP.

“Dalam bidang pemberdayaan, Pasal 36 ayat (2) huruf (d) menegaskan bahwa sebesar 10 persen dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat,” tambah Komarudin. Terkait dengan MRP dan DPRP, RUU ini memberikan kepastian hukum bahwa MRP dan DPRP berkedudukan masing-masing di ibu kota provinsi serta memberikan penegasan bahwa anggota MRP tidak boleh berasal dari partai politik.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut menambahkan, mengenai pembahasan partai politik lokal, RUU Otsus Papua mengadopsi putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal 28. UU ini juga memberikan kepastian hukum terkait dengan pengisian jabatan wakil gubernur yang berhalangan tetap.

Selain itu, dalam RUU ini diatur pula mengenai dana Otsus yang disepakati mengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui perubahan tata kelola dana otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi.

Kemudian, masih kata Komarudin, RUU ini juga mengatur tentang hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3), pemekaran provinsi di tanah Papua, serta peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah harus dikonsultasikan dengan DPR, DPD dan Pemerintah Daerah di Papua.

“Mari kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh revisi Undang-Undang sesuai dengan tugas dan wewenang kita masing-masing, terutama bagi Parpol yang akan menentukan rekrutmen kepemimpinan daerah yang akan memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan undang-undang ini dapat dilaksanakan atau tidak,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Papua tersebut. ■ *bia/sf*

# Penegakan PPKM Darurat Harus Persuasif



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/Man

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengimbau pemerintah dengan aparatnya untuk mengedepankan empati selama penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah. Pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran virus yang memakan banyak korban jiwa ini.

"Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot," ujar Puan, Selasa (13/7). Meski demikian, ia memahami tidak semua aparat bertindak dengan cara seperti itu.

"Ada juga (petugas) yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Tapi tolong sebisa-bisa hindari keributan dalam penegakan aturan di lapangan," tegasnya. Politisi PDI-Perjuangan itu turut menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM yang kurang mengedepankan sisi humanis.

Hal tersebut berdampak dengan

munculnya spontanitas dari sejumlah warga masyarakat yang berbuntut keributan. Untuk itu ia mengimbau agar pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman ganasnya virus Covid-19.

"Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini," papar Puan.

Selama PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, sejumlah sektor dibatasi aktivitasnya. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini, Puan mendorong pemerintah mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat.

Apalagi, sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. "Tidak sedikit rakyat yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur *ngebul*," ujar Puan. ■ ah/sf



#### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

#### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

#### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

#### PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

#### W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

#### REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

#### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

#### SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

#### ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Deslianti, S.I.Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadialih, Nafisa Hanum Alaydrus

#### FOTOGRAFER

Prima Danurirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari

#### ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

#### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

#### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

#### PENERBITAN

##### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

##### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

##### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

##### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

##### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

##### IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

##### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

##### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

##### ADMINISTRASI

##### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

##### ISI BERITA DAN MATERI FOTO

##### DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Sambut Baik Usulan Kompleks Parlemen jadi RS Darurat, Sufmi Dasco Paparkan Beberapa Kendala

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik usulan pemanfaatan

halaman Kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk perawatan pasien Covid-19. Dasco mengaku tak keberatan dengan usulan tersebut.

“Kami menyambut baik usulan tersebut kami tidak keberatan,” ungkap Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/7). Menindaklanjuti usulan pemanfaatan Gedung DPR/ MPR/DPD sebagai rumah sakit darurat, dirinya bersama sejumlah Anggota DPR RI memeriksa langsung ke beberapa tempat atau ruangan yang dimungkinkan dijadikan ruang perawatan Covid-19

Namun, dalam tinjauan tersebut ditemukan beberapa kendala, seperti tempat tidur pasien yang tidak dapat dimasukkan ke dalam *lift*. “Selain itu, banyak ruangan yang kedap suara dan sirkulasi udaranya tidak standar dan ada beberapa ruangan harus dibongkar jika akan digunakan,” kata Dasco.

Salah satu ruang yang diusulkan untuk dijadikan ruang perawatan, lanjut Dasco yakni ruang Rapat Paripurna yang berada di Gedung Nusantara II lantai tiga. Namun, perlu diketahui konstruksi bangunan Paripurna tidak rata atau menurun. Jika nantinya digunakan untuk bangsal RS Darurat, itu tidak memungkinkan. Selain itu, akses menuju ruang tersebut hanya memiliki 1 *lift* dan tidak cukup untuk memasukan tempat tidur ke ruang Rapat Paripurna.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memeriksa langsung ruangan di Gedung DPR RI yang dimungkinkan dijadikan rumah sakit darurat untuk perawatan pasien Covid-19. Foto: Denus/Man

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan yang bisa dimungkinkan untuk dipergunakan yakni lapangan yang ada di DPR dengan ukuran 80x90 meter. Namun lapangan tersebut hanya bisa dibangun untuk tenda darurat.

“Kawan-kawan (media) bisa menilai secara teknis, memungkinkan atau tidak. Nah mungkin yang tersisa dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan, ya mungkin yang tersisa yang memungkinkan bisa dipakai adalah lapangan ukuran 80x90 (meter). Tentunya ini *nggak* bisa dibikin bertingkat, hanya tenda-tenda darurat,” papar Dasco kepada awak media.

Selain itu, kata Dasco, jika tetap akan menggunakan lapangan tersebut, yang harus dipikirkan adalah terkait

sarana kamar mandi dan lainnya. “Di sini juga dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana ini bukan hanya perawatannya saja, termasuk juga tempat dokternya, listrik, air dan lain-lain-lain. *Nah*, ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau *nggak* memakai lapangan,” tuturnya.

Menurut Dasco, masih banyak gedung di sekitar DPR RI yang bisa digunakan untuk RS Darurat Covid-19. “Di sekitar DPR ini masih banyak tempat yg bisa dipakai sebenarnya untuk RS Darurat misalnya. Ada beberapa gedung lah yang bisa dipergunakan. Tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak,” pungkas Dasco. ■ rmm/es



# Rachmat Gobel Dukung Pembangunan *Big Data* Setjen DPR RI



**S**ekretariat Jenderal DPR RI sedang membangun sistem *Big Data*. Pembangunan sistem ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel. Pembangunan *Big Data* ini penting untuk mendukung parlemen modern.

Dalam sambutan singkatnya pada FGD bertajuk "Pembangunan Sistem *Big Data* Sekretariat Jenderal DPR RI" secara virtual, Selasa (13/7), Gobel menyatakan, sistem *Big Data* ini kelak akan mengoptimalkan dukungan Kesetjengan DPR RI kepada lembaga parlemen.

"Saya Rachmat

”

## **BIG DATA MENJADI TULANG PUNGGUNG BAGI ANGGOTA DPR RI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DPR RI**

Gobel, mendukung pembangunan Sistem *Big Data* di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka mengoptimalkan dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Lembaga DPR RI, baik dukungan keahlian maupun administrasi," jelasnya.

*Big Data* bagi parlemen, lanjut Gobel, merupakan kebutuhan yang cukup mendesak untuk mendapatkan informasi, menghimpun data, atau menjangkau aspirasi atas isu-isu penting yang berkembang di masyarakat secara lebih cepat dan akurat.

*Big Data* menjadi tulang punggung bagi Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan berbasis data dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, serta diplomasi.

"Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh saudara Indra Pahlevi (Kapuslit BK DPR RI) dalam membangun sistem *Big Data* bagi Anggota DPR RI dan AKD DPR RI akan sangat bermanfaat dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPR RI sebagai parlemen modern," tutup politisi Partai NasDem tersebut. ■ mh/es

Wakil Ketua DPR RI  
Koordinator Bidang Industri  
dan Pembangunan (Korinbang)  
Rachmat Gobel. Foto: Jaka/Man



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Biofarma di Kota Bandung, Jawa Barat. Foto: Nadia/Man

# DPR Dukung Penganggaran Vaksinasi Nasional

**U**ntuk menyukseskan program vaksinasi, diperlukan partisipasi semua pihak. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, DPR RI mendukung segala kebutuhan penganggaran untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi nasional.

"Kita harus optimistis. Kita harus bertekad, semuanya harus berinisiatif untuk terlibat (dukung vaksinasi). Kita dukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah, langkah-langkah Biofarma, langkah-langkah semua pihak karena memang kita akan konsentrasi penanganan pandemi ini total. Jadi anggarannya kita arahkan ke sana,"

papar Gus Muhaimin, sapaan akrabnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Biofarma (Persero) di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/7).

Politisi PKB ini mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat harus mengikuti semua prosedur protokol kesehatan secara disiplin. "Mereka yang sudah divaksin maupun yang belum, harus disiplin menerapkan protokol kesehatan karena ini pangkal masalahnya. Mari kita percepat vaksinasi ini. Ayo berduyunduyun, kita tunjukkan bahwa kita bisa memiliki daya tahan dan daya tangkal yang kuat. Di semua negara yang sukses menangani pandemi ini adalah karena protokol kesehatannya berhasil," jelas Gus Muhaimin.

Turut serta dalam kunjungan ini, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza. Sementara itu, Direktur Utama PT Biofarma (Persero) Honesti Basyir mengatakan bahwa saat ini hal yang terpenting adalah bagaimana vaksin ini cepat diberikan kepada masyarakat.

"Dari data yang kita dapat yang 80 persen orang yang dirawat di rumah sakit itu belum divaksin, 8 persen itu yang baru vaksin pertama tapi sudah kena karena belum lengkap. Ada juga yang vaksin kedua tapi karena faktor komorbid atau memang saat divaksin memang sudah kena, tapi lagi masa inkubasi. Poinnya apa, vaksin yang bagus, lebih cepat divaksin, sudah, itu saja," kata Honesti.

Honesti mengatakan bahwa saat ini stok vaksin sangat mencukupi. Namun, untuk proses distribusinya sangat tergantung pada kesiapan dan permintaan dari pemerintah daerah. "Kalau sudah siap itu langsung dikirim. Sekarang tinggal masalahnya koordinasi antara pemerintah setempat dengan masyarakat untuk melakukan vaksinasi secepatnya," tutur Honesti. ■ eko/sf

# Komisi I Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dubes

**A**nggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 33 Calon Duta Besar yang berlangsung pada Senin hingga Rabu (12-14/7) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Uji kelayakan ini terdiri dari 6 sesi selama 3 hari bersifat tertutup, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat,” kata Christina dalam keterangan persnya, Senin (12/7). Ia menjelaskan, penerapan prokes ketat tersebut dilakukan dengan masing-masing fraksi mengirimkan satu orang perwakilannya dalam uji kelayakan tersebut. Selain itu durasi per sesi disepakati maksimal 2 jam 15 menit.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, proses uji kelayakan tersebut dapat berjalan lancar, dan melalui pertimbangan DPR RI, Indonesia akan dapat mengirimkan calon dubes terbaik untuk masing-masing negara perwakilan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di luar negeri.

Adapun daftar nama calon Dubes RI yang menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR RI sebagai berikut:

1. Ade Padmo Sarwono untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina;
2. Bebeb AK Djundjungan untuk Republik Yunani;
3. Tatang BU Razak untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis;
4. Pribadi Sutiono untuk Republik Slowakia;
5. Siswo Pramono untuk Australia merangkap Republik Vanuatu;
6. Triyogo Jatmiko untuk Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda;
7. Heru Subolo untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal;
8. Okto Dorinus Manik untuk Republik Demokratik Timor Leste;
9. Mayjen TNI Gina Yoginda untuk Republik Islam Afghanistan;
10. Sunarko untuk Republik Sudan;
11. Dewi Tobing untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa;
12. Lena Maryana Mukti untuk Kuwait;
13. Ghafur Akbar Dharmaputra untuk Ukraina merangkap Republik Armenia, dan Georgia;
14. Rudy Alfonso untuk Republik Portugal;
15. Muhammad Najib untuk Kerajaan Spanyol merangkap UNWTO;
16. Ardi Hermawan untuk Kerajaan Bahrain;
17. Agus Widjojo untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall Islands dan Republik Palau;
18. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan;
19. Fadjoel Rachman untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan;
20. Daniel TS Simanjuntak untuk Kanada merangkap ICAO;
21. Mohamad Oemar untuk Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan UNESCO;
22. Abdul Aziz untuk Kerajaan Arab Saudi merangkap OIC;
23. Muhammad Prakosa untuk Italia merangkap Republik Malta, Republik Siprus, Republik San Marino, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT;
24. Gandi Sulistiyanto Soeherman untuk Republik Korea;
25. Zuhairi Misrawi untuk Republik Tunisia;
26. Anita Lidya Luhulima untuk Republik Polandia;
27. Rosan Perkasa Roeslani untuk Amerika Serikat;
28. Fientje Suebu untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, dan Kepulauan Cook dan Niue;
29. Damos Dumoli Agusman untuk Republik Austria merangkap Republik Slovenia, UNOV, UNODC, UNCITRAL, UNOOSA, UNIDO, IAEA, CTBTO, OFID, dan IACA;
30. Suwartini Wirta untuk Republik Kroasia;
31. Derry MI Amman untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN;
32. Arrmanatha Nasir untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya;
33. Febrian A Ruddyard Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa. ■ ann/sf



Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Jaka/Man

# Ahmad Muzani: Beri Penghargaan Bagi Nakes dan Aparat Keamanan

**A**nggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi garda depan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Muzani menilai para nakes masih terus berjuang di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi harus memberikan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar kemanusiaan,” ujar Muzani dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Selasa (13/7).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemberian penghargaan sepatutnya untuk sukarelawan Covid-19 yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan, misalnya para sopir ambulans, petugas pemulasaraan, dan petugas gali kubur jenazah Covid-19.

Legislator dapil Lampung I itu mengatakan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta satpol PP karena sinergisitas dalam bekerja memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat

pada 3-20 Juli 2021, sehingga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan baik.

Muzani menambahkan, masyarakat bisa melihat di berbagai jalan saat pagi, siang, dan malam, anggota Polri dan TNI bersama Satpol PP bekerja tidak henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. “Akan lebih bermanfaat apabila sinergi mereka dapat dihargai dengan penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Muzani menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan dan para sukarelawan tersebut. Langkah itu, menurutnya, karena dari mereka tidak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar Covid-19. Sehingga atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. ■ sf



**PEMBERIAN  
PENGHARGAAN  
SEPATUTNYA UNTUK  
SUKARELAWAN COVID-19  
YANG TELAH BEKERJA  
HINGGA TIDAK  
MEMPEDULIKAN  
KESELAMATAN**



Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani. Foto: Ist/Man



# DPR Setujui Tiga Nama Pemain Naturalisasi Baru Timnas Basket Indonesia

**K**omisi III DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Dame Diagne, Marques Terrel Bolden dan Serigne Modou Kane untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga nama tersebut diharapkan menjadi nama baru yang akan memperkuat timnas bola basket Indonesia ke depannya, terutama dalam menyambut FIBA Asia pada 17 Agustus mendatang.

“Kita sudah dengarkan langsung paparan dari Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan yang bersangkutan juga ada. Jadi langsung saya tanya kepada Anggota yang ada apakah permohonan pertimbangan WNI untuk ketiga nama tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat Rapat Kerja virtual dengan Menpora Zainuddin Amali dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (14/7).

Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan Anggota yang hadir secara fisik dan virtual menyetujui agar ketiganya dapat diproses status kewarganegaraannya. “Kita sudah dengarkan langsung persetujuan dari Anggota Komisi III yang hadir secara fisik maupun virtual sehingga ketiga nama-nama ini yaitu Dame Diagne, Marques Terrel Bolden dan Serigne Modou Kane dapat diteruskan permohonan WNI-nya” pungkas Herman dalam paparannya.

Diketahui dalam rangka menyambut gelaran FIBA Asia yang akan digelar di Jakarta, 17-29



**KETIGA NAMA TERSEBUT DIHARAPKAN MENJADI NAMA BARU YANG AKAN MEMPERKUAT TIMNAS BOLA BASKET INDONESIA KE DEPANNYA**

Agustus mendatang, Timnas Basket Indonesia mengajukan tiga pemain untuk dinaturalisasi. Ketiga pemain itu dikategorikan masih muda, sehingga mereka dipersiapkan untuk membela timnas pada masa yang akan datang. ■ tn/sf

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto: Arief/invl



# Muslim Nilai Produk Pangan Indonesia Lebih Unggul dari Produk Impor

**A**nggota Komisi IV DPR RI Muslim meminta pemerintah harus segera menghentikan kebijakan impor bawang merah. Ia menilai petani bawang di Indonesia masih mampu memenuhi permintaan dan kualitas produk impor tersebut masih lebih rendah dibandingkan produk bawang merah dalam negeri.

“Saya menyayangkan kenapa saat ini masih melakukan impor bawang merah dari luar negeri, padahal petani bawang merah di Indonesia itu saya sudah lihat sendiri dapat menghasilkan produk yang lebih unggul ketimbang produk impor” kata Muslim saat Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Hortikultura Komisi IV DPR RI secara virtual dengan sejumlah *stakeholder*, Senin (12/7).

Hadir dalam RDPU secara virtual tersebut, di antaranya perwakilan

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia; Pusat Kajian Hortikultura Tropika; Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia; Institute For Development of Economics and Finance; dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan kebijakan impor bahan pangan dalam jumlah besar akan mencederai kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Ia menyampaikan kebijakan impor tersebut dilakukan di tengah kemajuan teknologi dan tersedianya lahan yang sangat luas di seluruh Indonesia.

“Saya masih memaklumi jika yang diimpor itu bawang putih, karena

”

**SAYA MENYAYANGKAN KENAPA SAAT INI MASIH MELAKUKAN IMPOR BAWANG MERAH DARI LUAR NEGERI, PADAHAL PETANI BAWANG MERAH DI INDONESIA ITU SUDAH LIHAT SENDIRI DAPAT MENGHASILKAN PRODUK YANG LEBIH UNGGUL KETIMBANG PRODUK IMPOR**

ketersediannya menipis. Tetapi juga harus kita dorong (produksi sendiri) jangan sampai berlarut-larut (impornya). Lain halnya jika bawang merah atau kebutuhan pangan lain mengapa sampai sekarang impor, padahal produk dalam negeri itu bagus,” imbuh Muslim.

Lebih lanjut legislator dapil Aceh II itu mendesak pemerintah untuk mencari cara agar tidak terus mengandalkan produk pangan impor karena dikhawatirkan hanya akan menambah beban keuangan negara dan penderitaan rakyat.

■ tn/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim. Foto: Andri/Man



# Evita Nursanty Dukung Vaksin Gotong Royong Untuk Individu

**A**nggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menyatakan dukungan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk individu maupun badan usaha guna mempercepat terbentuknya kekebalan komunal (*herd immunity*). Menurutnya, langkah ini juga demi mempercepat tercapainya vaksinasi secara nasional dengan keikutsertaan vaksinasi yang makin luas.

Menurut Evita, vaksinasi individu merupakan pengembangan dari vaksin gotong royong untuk badan usaha yang saat ini terus berlangsung mengingat masih banyak pihak belum tersentuh program vaksinasi gotong royong yang digawangi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Ternyata tidak sedikit perusahaan pribadi, perusahaan kecil, bahkan termasuk adanya kesulitan yang dihadapi warga negara asing mendapatkan akses vaksin,” kata Evita dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (13/7).

Perlu diingat, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, program vaksinasi gotong royong individu ini dibuka setelah dipastikan pasokan vaksin milik pemerintah makin masif. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena program vaksinasi gotong royong untuk individu dan perusahaan

”

**PROGRAM VAKSINASI  
GOTONG ROYONG  
INDIVIDU INI  
DIBUKA SETELAH  
DIPASTIKAN  
PASOKAN  
VAKSIN MILIK  
PEMERINTAH  
MAKIN MASIF**

Anggota Komisi VI DPR RI  
Evita Nursanty. Foto: Oji/Man

tidak akan mengganggu jatah vaksin masyarakat.

Dikatakan pula oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu, jenis vaksin yang digunakan maupun sumber pendanaannya berbeda. Vaksin gotong royong tidak menggunakan vaksin yang dialokasikan pemerintah. Selain itu, juga tidak menggunakan vaksin Covid-19 yang berasal dari sumbangan atau hibah dari kerja sama bilateral.

“Vaksin gotong royong berasal dari keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan BUMN farmasi, sedangkan program vaksinasi pemerintah sumbernya dari APBN,” katanya. Evita berharap program vaksinasi gratis dari pemerintah maupun mandiri atau gotong royong dapat

berjalan lancar sehingga target vaksinasi nasional bisa segera tercapai.

■ sf



# Nusron Wahid Kritisi Pemberian PMN untuk BNI dan BTN

**A**nggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengkritisi upaya Kementerian BUMN yang ingin memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BNI dan BTN dalam sifatnya untuk pengembangan bisnis. Menurutnya, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan *settle* sehingga pemberian PMN kepada perusahaan yang sehat ini dianggap tidak tepat.

Hal tersebut diutarakannya ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7). Selain itu Nusron juga menilai pemberian PMN tersebut dengan dalih pengembangan bisnis sangat tidak sesuai dengan semangat negara saat ini untuk mengatasi pagebluk ini.

“Menurut hemat kami dalam situasi semacam ini sangat kurang pas. Melihat BUMN ini tidak pernah ada subsidi dan proteksi apapun itu adalah BUMMN Perbankan. Nah salah satunya adalah BNI dan BTN. Saya paham betul bagaimana BNI dengan masuknya beberapa orang hebat seperti Komisaris Utama-nya Pak Agus Marto itu mempunyai ambisi dan misi,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini pun memberi usulan penguatan BNI dan BTN seperti menempuh jalur *right issue* dan juga menahan dividen yang seharusnya disetorkan

kepada pemegang saham untuk kemudian dijadikan rekapitalisasi tambahan *Capital Adequacy*



**PEMBERIAN PMN TERSEBUT DENGAN DALIH PENGEMBANGAN BISNIS SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT NEGARA SAAT INI UNTUK MENGATASI PAGEBLUK INI**

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto: Oji/Man



*Ratio* (CAR). Sehingga target Rp40 triliun dividen Kementerian BUMN tahun depan harus dikecualikan kepada BNI dan BTN.

“Jadi target daripada Menteri BUMN untuk 40 triliun dividen tahun depan *excluding*-kan BTN dan BNI. Genjot saja PLN, Pertamina, Mandiri, dan BRI, tetapi dividen atau keuntungan daripada BNI dan BTN diberikan untuk kepentingan rekapitalisasi supaya CAR-nya meningkat, supaya BNI dan BTN masuk menjadi Bank Tier I Capital tidak ketinggalan dengan yang lain,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah II itu.

Kementerian BUMN memang mengusulkan pemberian PMN dalam tujuan sebagai modal pengembangan bisnis hanya kepada BNI dan BTN sebesar Rp7 triliun kepada BNI dan Rp2 triliun kepada BTN. Nusron sendiri lebih menyetujui anggaran tersebut difokuskan untuk membangun industri farmasi dan rumah sakit dalam negeri.

“Sebagai gantinya uang tujuh triliun dari BNI dan dua triliun dari BTN, jadi ada sembilan triliun. Kami lebih setuju usulan dalam *sense*

*of crisis* seperti ini ada sinyal politik bahwa kita ingin membesarkan industri farmasi kita, ingin membesarkan rumah sakit kita, terutama yang dimiliki oleh BUMN,” tandas Nusron. ■ er/es



# Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Kenaikan Harga Batu Bara

**A**nggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum kenaikan harga batu bara dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba). Menurutnya, harga batu bara menyentuh level tertinggi sejak November 2011 seiring meningkatnya tingkat konsumsi di negara Asia.

“Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian beberapa negara konsumen batu bara terbesar dunia, seperti China dan Amerika Serikat, harga batu bara pada tahun 2021 melonjak drastis karena tingginya permintaan dari negara-negara tersebut,” kata Rofik dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (8/7).

Rofik mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini telah memukul kinerja dunia usaha di Indonesia, salah satunya di bidang pertambangan minerba. Namun tercatat per Juli 2021, harga acuan batubara (HBA) kembali menguat dan mencapai 115,35 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata di tahun 2020 sebesar 58,17 dolar AS per ton atau yang terendah sejak tahun 2015.

“Sebagai contoh produksi batubara yang mengalami penurunan 9,5 persen dari 616,16 juta ton pada tahun 2019 menjadi 557,54 juta ton di tahun 2020. Hal ini berdampak kepada PNBP sektor minerba, yang menurun signifikan sebesar 24,1 persen dari Rp45,59 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp34,6 triliun

di tahun 2020,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Akan tetapi, ujar Rofik, adanya kenaikan harga ini secara otomatis akan meningkatkan PNBP Minerba khususnya dari penjualan batu bara secara keseluruhan pada tahun 2021 ini. Bahkan, lanjutnya, diperkirakan harga ini akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi oleh negara-negara konsumen batubara lainnya.

“Kinerja produksi dari semua tambang harus dioptimalkan, namun tetap dalam kaidah-kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ketika produksi batu bara dan mineral lainnya digenjut, justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di wilayah sekitar tambang,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan harga batu bara acuan untuk Juli 2021 naik sebesar 15,02 dolar AS per ton menjadi 115,35 dolar AS per ton dibandingkan harga bulan sebelumnya yang berada pada level 100,33 dolar AS per ton.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama KESDM Agung Pribadi mengungkapkan harga batu bara acuan itu sentuh level tertinggi dalam 10 tahun terakhir karena dipicu peningkatan konsumsi di negara-negara Asia Timur. “Kapasitas pasokan batu bara domestik China terus menipis seiring kembalinya geliat aktivitas pembangkit listrik. Kenaikan itu menjadi yang paling tinggi dalam satu dekade,” kata Agung.



Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Azka/Man

Agung mengungkapkan China cukup kewalahan memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri akibat terjadinya kendala operasional, seperti kecelakaan tambang dan perubahan cuaca ekstrem. Selain China, Jepang dan Korea Selatan juga menunjukkan grafis kenaikan serupa yang berimbas pada kenaikan harga batu bara global.

Harga batu bara acuan diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total kelembaban 8 persen, total belerang 0,8 persen, dan abu 15 persen.

■ ann/sf

# Darurat Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan Nasional

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan respon kedaruratan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan RDP dengan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7).

“Kami minta pemerintah memperkuat sistem kesehatan nasional di tengah kedaruratan pandemi Covid-19 dengan memastikan kecukupan tempat tidur sakit, tempat tidur isolasi dan tempat tidur intensif (ICU), ventilator, oksigen, HFNC, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan, termasuk penyediaan rumah sakit lapangan/darurat,” kata Ninik saat membacakan kesimpulan.

Selain itu, lanjut Ninik, pihaknya juga meminta Kemenkes meningkatkan perlindungan terhadap seluruh tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19, termasuk tes PCR berkala, nutrisi, APD, jam kerja, insentif tepat waktu dan lain-lain; mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan di luar Pulau Jawa dan Bali

menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19; dan mengoptimalkan tatalaksana penanganan pasien Covid-19 untuk meningkatkan angka kesembuhan.

“Demi meningkatkan kualitas data *testing* dan *tracing* di

Indonesia, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memastikan agar data spesimen pemeriksaan Covid-19 yang menggunakan metode Nucleic Acid Amplification Test (qRT PCR, TCM Isothermal, TCM Non Isothermal, dan LAMP) masuk ke dalam New All Record (NAR),” kata Ninik.

Ninik juga meminta Kemenkes berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk mengutamakan percepatan vaksinasi program terutama di daerah-daerah zona merah; memperbaiki distribusi vaksin dari pusat ke daerah; memperbanyak sentra vaksinasi guna mempermudah masyarakat mengakses vaksinasi; dan memastikan percepatan pemberian honorarium vaksinator.

Selain itu, politisi PKB tersebut juga meminta Kemenkes segera memperbaiki kebijakan penanganan pasien Covid-19 isolasi mandiri dengan memperhatikan seluruh masukan Anggota DPR, di antaranya memperluas penyediaan layanan *telemedicine*; membuat mekanisme bagi isoman yang tidak bisa menjangkau *telemedicine*; hingga menyederhanakan prosedur dan persyaratan untuk mengakses bantuan obat pemerintah.

Kemudian, Kemenkes juga perlu bekerjasama dengan Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah untuk secara aktif dan proaktif mengawasi kesehatan pasien isoman menyosialisasikan panduan isoman yang benar secara massif dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sementara kepada Kepala Badan POM, Ninik meminta BPOM untuk memaksimalkan pengawasan *post market* guna mengawal distribusi obat-obat Covid-19 di setiap daerah sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). “Badan POM baik sendiri maupun bersama aparat penegak hukum mengintensifkan pengawasan dan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha dan distributor obat-obat Covid-19 agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutup legislator dapil Jawa Timur III itu.

■ rnm/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Azka/Man

# Naturalisasi Jangan Kecilkan Perasaan Atlet Lokal

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, naturalisasi atlet asing jangan sampai mengecilkan perasaan dan hati atlet-atlet lokal yang ada. Hetifah yakin masih banyak atlet-atlet lokal yang memiliki potensi dan kualitas yang jauh lebih baik.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang membahas tentang persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada tiga orang atlet cabang olahraga Basket atas nama Dame Diagne, Marques Terrell Bolden, dan Serigne Modou Kane.

Di satu sisi, Hetifah juga memahami niat dan tujuan permohonan pemberian naturalisasi dari ketiga atlet basket tersebut, yaitu untuk meningkatkan prestasi Indonesia diberbagai turnamen internasional, terutama pada even Viva Asia Cup 2021 dan Viva World Cup 2023. Secara usia, ketiga atlet Basket ini pun memang masih tergolong muda, dan prestasinya juga tidak diragukan.

“Sekarang ini banyak atlet (lokal) yang kondisinya agak memprihatinkan karena tidak bisa bertanding dan terdampak ataupun terkena Covid-19. Jangan sampai naturalisasi atlet-atlet baru ini mengecilkan perasaan atau hati mereka. Tetap dibesarkan hati atlet-atlet lokal kita yang sudah bersusah payah untuk *survive* di masa covid-19, Perasaan psikologisnya tetap harus diperhatikan,” ucap Hetifah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7).

Hetifah juga merasa sangat yakin bahwa kualitas atlet-atlet lokal banyak yang bagus. “Kami tetap berharap, setiap kali ada proses naturalisasi kita

tetap berpesan agar tetap berupaya mencetak kontribusi yang tertinggi, signifikan dari atlet-atlet lokal juga,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Terkait dengan regulasi, tambah legislator dapil Kalimantan Timur itu, Indonesia pernah memiliki kasus atlet naturalisasi yang terhadap regulasi dan tidak bisa bermain dikancah internasional untuk membela Indonesia.

“Kita juga tidak ingin ada regulasi-regulasi terbaru yang nantinya bisa menghambat, seperti berapa jumlah pemain naturalisasi yang bisa ikut dalam kompetisi internasional dan yang lain-lainnya. Ini bisa menjadi catatan kita semua. Intinya kita harus lebih teliti untuk menyikapi regulasi dari federasi olahraga internasional, khususnya ditengah kondisi ketidakpastiaan masa pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Hetifah. ■ dep/es

Wakil Ketua  
Komisi X DPR RI  
Hetifah Sjaifudian.  
Foto: Azka/Man



”

**SEKARANG INI BANYAK ATLET (LOKAL) YANG KONDISINYA AGAK MEMPRIHATINKAN KARENA TIDAK BISA BERTANDING DAN TERDAMPAK ATAUPUN TERKENA COVID-19. JANGAN SAMPAI NATURALISASI ATLET-ATLET BARU INI MENGECILKAN PERASAAN ATAU HATI MEREKA.**

# RUU KUP Dorong Keberlanjutan Reformasi Perpajakan Nasional

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, bidang perpajakan Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mereformasi sistemnya. Hasil dari perjalanan panjang tersebut telah membawa sistem perpajakan menjadi lebih *sustainable*.

Komisi XI DPR RI mendorong agar Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ini dapat menangkap perubahan zaman. Serta menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting.

“RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. Juga membangun pondasi perpajakan dalam rangka keberlanjutan reformasi perpajakan untuk menjawab berbagai tantangan,” ujar Amir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dengan pakar perpajakan secara virtual, Selasa (13/7).

Selain itu, Amir mengungkapkan bahwa agenda reformasi perpajakan Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan dunia usaha dan tren perpajakan global. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem perekonomian global.

“Hal itu ditandai dengan maraknya transaksi lintas negara dan transaksi ekonomi digital,” sebut politisi PPP itu. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pihak pengusul RUU KUP, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat

untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan.

”

**RUU KUP DIRANCANG UNTUK MELETAKKAN PONDASI SISTEM PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF DAN AKUNTABEL. JUGA MEMBANGUN PONDASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEBERLANJUTAN REFORMASI PERPAJAKAN UNTUK MENJAWAB BERBAGAI TANTANGAN**

Adapun RUU KUP kali ini memuat lima kelompok materi utama yang masing-masing di dalamnya berisi pengaturan-pengaturan tertentu. Kelima itu ialah terkait perubahan materi UU KUP, perubahan materi UU PPh, perubahan materi UU PPN, perubahan materi UU Cukai dan rencana penerapan pajak karbon. ■ ah/es

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.  
Foto: Andri/Man





# RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Beri Jaminan Perlindungan Bagi Korban

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menegaskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) berusaha memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan korban. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman sejumlah kelompok masyarakat yang justru menghambat pembahasan dan pengesahan.

“Menurut saya penting dalam proses yang berjalan ini kita bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Caranya dengan dialog dan edukasi,” ujar Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan sejumlah narasumber terkait penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7).

Politisi dari F-NasDem itu menyebut ada upaya untuk menggagalkan pembahasan RUU PKS. Salah satunya menuding RUU PKS melegalkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta mendukung pergaulan bebas. “Salah kaprah terhadap RUU ini dengan mengaitkan mendukung LGBT,” katanya.

Dia menegaskan RUU PKS sama sekali tidak membahas isu tersebut. Sebaliknya, RUU ini justru memberikan kepastian perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Beleid tersebut juga menjamin pemulihan korban.

Sebab, substansi yang diatur berdasarkan data, fakta, dan pengalaman korban kekerasan.

“Menurut saya pengalaman pahit korban itu adalah fakta. Dasar yang seperti ini kalau kita bicara metodologi ini dasar yang

paling valid kalau menurut saya, sumber yang primer,” terang legislator dapil Lampung I itu.

Menurut Taufik, hal tersebut seharusnya diperhatikan dan dibahas dalam penyusunan RUU PKS. “Dan itu topiknya, jadi bukan hal-hal yang tidak relevan yang tidak berhubungan dengan RUU ini. Misalnya isu kebebasan seksual lah, pembebasan penggunaan pakaian, ketakutan atas gerakan feminis dan sebagainya,” sambung Taufik.

Karena itu, kesalahpahaman ini harus diluruskan agar tidak terjadi salah kaprah dalam memahami RUU PKS. Ia menyebut berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, kasus kekerasan selama pandemi Covid-19 masih tinggi. Sebanyak 4.849 orang mengalami kekerasan seksual sepanjang 2020. “Dengan tingginya jumlah korban pelecehan seksual, seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak agar mengawal dan mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang,” tandasnya.

RDPU menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), hingga Psikolog Tenaga Ahli Psikolog Klinis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Selain itu, Baleg DPR RI juga mengundang Dosen Fakultas Hukum UGM, Cendekiawan Muslimah Dosen Paskasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta, dan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ■ ann/sf

Anggota Baleg DPR RI  
Taufik Basari.  
Foto: Jaka/Man



# Ibas Minta Kemenkeu Temukan Terobosan terkait Kebijakan Pajak

**W**akil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menemukan terobosan yang *out of the box* dalam mengambil langkah kebijakan terkait pajak.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang serba salah jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

“Satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Tetapi di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak sembako untuk rakyat dan pajak

”

**KITA BUTUH PENDAPATAN NEGARA YANG CUKUP BESAR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA YANG BESAR. TETAPI DI SISI LAIN, JANGAN SAMPAI MEMBEBANI MASYARAKAT, SEPERTI PAJAK SEMBAKO UNTUK RAKYAT DAN PAJAK PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT**



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Foto: Jaka/Man

pendidikan untuk rakyat,” terang politisi yang akrab disapa Ibas itu dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan yang digelar secara virtual, Senin (12/7).

Diketahui, defisit anggaran pada semester I tahun 2020 mencapai Rp283,2 triliun atau sekitar 1,72 persen terhadap PDB. Ibas memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami peningkatan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum membaik.

Melihat dari keberadaan pandemi Covid-19 yang tidak akan berlalu

dengan singkat, Ibas mengingatkan, sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai masih rendah realisasinya dibandingkan tahun lalu. Terlebih lagi, PPKM Darurat pada 3-20 Juli saat ini baru akan terasa dampaknya pada penerimaan di bulan Agustus.

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, jika resesi terjadi maka dampaknya dirasakan masyarakat luas. Penjualan perusahaan sudah pasti akan turun, begitu juga IHSG. Dia meminta pemerintah menanggapi isu ini dengan bijak. “Jangan sampai justru masyarakat sedang susah, banyak usaha sedang susah tapi dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” pungkasnya. ■ hal/es

# BKSAP: Cegah Pandemi Melalui Sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan

**A**nggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Darul Siska mengatakan DPR RI sangat mendukung upaya pencegahan pandemi melalui konservasi lingkungan, restorasi, habitat satwa dan penindakan terhadap perdagangan ilegal satwa liar. Ia mendorong agar pencegahan pandemi melalui pendekatan lingkungan dan penyelamatan satwa liar disinkronkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

“Upaya penanganan pandemi dari perspektif kerusakan lingkungan dan habitat satwa juga perlu dikaitkan dengan agenda pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama tujuan 15 sehingga berbagai pihak dari level regional, nasional, dan lokal dapat berkontribusi,” ucap Darul Siska dalam webinar bertajuk “Preventing Pandemic Through One Health Approach” yang diselenggarakan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan FREELAND dan dihadiri anggota parlemen 7 negara ASEAN, Rabu (7/7).

Webinar tersebut mendiskusikan bagaimana kerusakan lingkungan dan perdagangan serta kejahatan terhadap satwa liar mempengaruhi munculnya pandemi Covid-19. Dalam webinar itu, disepakati ASEAN sebagai institusi regional beserta negara-negara anggotanya setuju untuk mengadopsi pendekatan *One Health*, yaitu pembangunan terintegrasi antara

”

## KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERDAGANGAN SERTA KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR MEMPENGARUHI MUNCULNYA PANDEMI COVID-19

kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan.

Anggota BKSAP DPR RI Yohanis Fransiskus Lema yang turut hadir dalam webinar itu menegaskan upaya untuk menjaga alam, ekosistem, melestarikan habitat dan lingkungan hidup ini menjadi komitmen yang harus dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Maka, penting diperlukan kolaborasi berbagai negara untuk menjaga ekosistem.

Karena itu, lanjut Ansy Lema, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan tersebut, Indonesia berkomitmen dan akan terus berupaya memerangi perdagangan satwa secara ilegal dan meningkatkan kerja sama regional untuk memutus mata rantai perusakan ekosistem.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa Covid-19 merupakan suatu *zoonotic outbreak* yaitu pandemi yang disebabkan oleh transmisi virus dari hewan ke manusia. Hal ini akibat dari semakin eratnya kontak manusia dan hewan seiring meningkatnya konsumsi, perdagangan ilegal, dan kekerasan terhadap satwa langka,” imbuh Ansy Lema yang memimpin delegasi BKSAP DPR RI.

■ ann/sf

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Darul Siska. Foto: Azka/Man



# Big Data Untuk Parlemen Modern yang Produktif



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Jaka/Man



**PARLEMEN MODERN DALAM KONTEKS Mendukung Fungsi Parlemen, maka peran Big Data menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan. Transformasi data menjadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR**

**S**ebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri. Salah satunya dengan membangun *Big Data* yang integratif dan komprehensif. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi keniscayaan untuk dimiliki sebuah parlemen modern. Maka *Big Data* menjadi sangat krusial dalam mendukung semua kerja dan fungsi parlemen.

Dalam sambutan pembukan *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Pembangunan Sistem *Big Data* Sekretariat Jenderal DPR RI” yang digelar Badan Keahlian DPR RI, Rabu (14/7), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa *Big Data* yang sedang dibangun sangat penting untuk mendukung peran parlemen modern.

“Parlemen modern dalam konteks mendukung fungsi parlemen, maka peran *Big Data* menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan. Transformasi data menjadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR. Sistem pengambilan putusan dapat diintegrasikan kepada *Big Data* DPR untuk mendukung pelaksanaan fungsi parlemen modern yang efektif dan produktif,” tandas Indra saat memberi sambutan secara virtual.

Menurut Indra, sistem pengambilan keputusan di parlemen harus cerdas, lugas, dan adaptif baik saat menjalankan fungsi perancangan UU, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran yang ada DPR. Proses transformasi ini, lanjut Indra, sedang diupayakan secara maksimal untuk diimplementasikan

dalam organisasi, agar dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi.

“DPR saat ini sedang terus berbenah dan merespon perubahan lingkungan yang makin dinamis dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan,” ungkapnya lebih lanjut. Dijelaskan Indra, Setjen dan BK DPR RI sedang membangun peningkatan kualitas pelayanan bagi DPR RI yang berbasis digital. Kerja dan pelayanan tersebut tentu untuk peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada Anggota Dewan.

Membangun sistem *Big Data* di DPR, sambung Indra, diperlukan dua sasaran program, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan pemanfaatan teknologi untuk kemudahan akses informasi bagi publik sebagai pra syarat parlemen modern. ■ mh/sf

# Big Data DPR Butuh SDM Cakap Digital

**P**embangunan sistem *Big Data* DPR RI yang sedang dicanangkan sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cakap digital. Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai, dengan SDM seperti itu, pertukaran dan integrasi data akan berjalan dengan baik.

“Pembangunan dan pengembangan *Big Data* di DPR RI memerlukan strategi yang tepat. Infrastruktur informasi dan komunikasi akan memerlukan dukungan SDM yang cakap digital, sehingga proses integrasi dan pertukaran data internal-eksternal berjalan dengan baik dan lancar,” katanya saat memberi sambutan pada acara *Focus Group Discussion* (FGD) BK DPR RI secara virtual bertajuk “Pembangunan Sistem *Big Data* Sekretariat Jenderal DPR RI”, dari Gedung Setjen DPR RI, Rabu (14/7).

Menurut Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, pembangunan *Big Data* sangat vital dan penting, khususnya bagi BK DPR RI. Selain vital bagi kerja dan fungsi BK, *Big Data* ini juga sangat dibutuhkan bagi kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI. BK tentu membutuhkan data yang akurat, tepat, dan cepat sebagai bahan baku dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam pembuatan kebijakan di DPR RI.

“BK ingin menjaga komitmen agar perumusan kebijakan di DPR betul-betul menerapkan apa yang disebut *evidence base policy making*. Kami menginginkan dengan data dan informasi yang kita sajikan pada dewan, dapat menambah argumentasi data dan informasi, sehingga perdebatan di komisi, baik pembahasan UU maupun pembahasan APBN, dan pengawasan betul-betul



Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Jaka/Man

didukung data yang kuat, baik data empiris maupun *scientific*,” urai Sensi.

Selanjutnya, BK, ujar Sensi, akan menjembatani dunia akademis, dunia saintifik, dan dunia nyata dengan

perdebatan politik di DPR. Dengan demikian, terciptalah suasana rapat kerja yang bermutu, karena Anggota DPR sudah dibekali yang data akurat.

■ mh/sf

# Legislator Dorong Regulasi Otsus Percepat Pembangunan di Papua

**A**nggota Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua Trifena M. Tinal mengharapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat mendorong pembangunan di bumi cenderawasih. Hal itu Trifena sampaikan sebagai pandangan akhir Fraksi Partai Golkar terkait pembahasan RUU Otsus Papua.

“Fraksi Golkar sepakat kebijakan Otsus diharapkan tak hanya atasi keamanan, namun juga mempercepat pembangunan di Papua,” ujarnya saat raker Pansus Otsus Papua dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/7). Yang pada akhirnya, UU Otsus yang baru didorong agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Tak lupa, perubahan kedua regulasi tersebut juga diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi, mendorong pengakuan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dan penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan optimal. Selain itu, Fraksi Golkar juga memberikan beberapa catatan terhadap perubahan UU Otsus seperti perluasan kewenangan daerah.

“Hal itu merupakan aspirasi daerah agar menciptakan kemandirian penyelenggaraan pembangunan. Kemandirian ini diperlukan karena daerah kabupaten/kota lebih memahami kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput,” urai Trifena.



Anggota Pansus RUU Otsus Papua Trifena M. Tinal menyerahkan pandangan fraksinya kepada Mendagri dan Menkeu saat raker Pansus Otsus Papua. Foto: Arief/Man

Lebih lanjut, ia juga mendorong upaya memperbaiki kualitas demokrasi secara umum dengan peningkatan partisipasi OAP. Oleh karena itu, Fraksi Golkar merasa perlu dilakukan tindakan afirmasi politik.

Sementara itu, berkaitan dengan pembinaan terhadap pengelolaan dana otsus, Fraksi Golkar memandang perlunya prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran pada rangkaian pengelolaan tersebut. Dari sisi pengawasan dana otsus, Trifena menyampaikan, perlu koordinasi berbagai pihak meliputi kementerian/ lembaga, DPR hingga DPRD, BPK dan

perguruan tinggi. “Pembinaan dan pengawasan diharapkan berjalan baik agar benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” terangnya.

Pada akhirnya, Fraksi Golkar mengapresiasi setinggi-tingginya hasil pembahasan Pansus Otsus Papua yang tetap berjalan lancar dan produktif di tengah pandemi.

“Semoga ini bermanfaat luas bagi masyarakat Papua. Kami, dari Fraksi Partai Golkar, menyetujui RUU hasil pembahasan Pansus supaya dibawa ke Rapat Paripurna agar disahkan menjadi UU,” pungkas politisi dapil Papua tersebut. ■ ah/sf

# Big Data DPR Mampu Menganalisis Informasi Publik

**B**ig Data DPR RI yang sedang dibangun kelak tidak sekadar menghimpun data dan informasi, lebih dari itu mampu menganalisis beragam informasi publik. Pembangunan *Big Data* ini sekaligus memperkuat peran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pada bidang keahlian dan administrasi.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah menyampaikan hal ini, Rabu (14/7). “Saya memberikan dukungan kepada saudara Indra Pahlevi dalam upaya membangun

sistem Big Data di Sekretariat Jenderal DPR RI,” tuturnya saat memberi testimoni untuk Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi.

Pembangunan sistem *Big Data* di Sekretariat Jenderal DPR RI, kata Dimiyati, dapat memperkuat peran Setjen DPR RI sebagai *supporting system*, baik di bidang keahlian maupun administrasi. “Big Data bagi DPR RI tidak sekadar mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah yang besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara cepat untuk menerima dan menganalisis berbagai informasi yang berasal dari publik,” paparnya.

Informasi publik itu, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, bisa berupa aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam *Big Data* DPR. Dengan

Wakil Ketua BURT DPR RI  
Achmad Dimiyati Natakusumah.  
Foto: Mentari/Man

”

**BIG DATA BAGI DPR RI TIDAK SEKADAR MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI DALAM JUMLAH YANG BESAR, TETAPI JUGA DAPAT DIMANFAATKAN SECARA CEPAT UNTUK MENERIMA DAN MENGANALISIS BERBAGAI INFORMASI YANG BERASAL DARI PUBLIK**

begitu, setiap keputusan yang diambil DPR RI benar-benar mencerminkan harapan rakyat, baik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.

“Begitu pula sebaliknya, informasi yang berkaitan dengan aktivitas parlemen dapat dengan cepat dan tepat diketahui oleh masyarakat secara luas sebagai upaya DPR RI untuk mendekatkan diri dengan rakyat menuju keterbukaan parlemen atau *Open Parliament*, yaitu lembaga legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandas Dimiyati lagi.

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap, pembangunan sistem *Big Data* dapat selesai dan diimplementasikan dengan cepat, sehingga dapat memperkuat dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI kepada Anggota Dewan dan Alat Kelengkapan DPR RI. ■ mh/sf



SEGENAP PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**RACHMAT GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORINBANG



**M. AZIS SYAMSUDDIN**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM



**PUAN MAHARANI**  
KETUA DPR RI



**SUFMI DASCO AHMAD**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KOREKKU



**A. MUHAIMIN ISKANDAR**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORRESRA

mengucapkan :

Selamat Hari Raya

*Idul Adha*

10 Dzulhijjah 1442 H



**Tetap Taati Prokes :**



Tetap  
Gunakan  
Masker



Mencuci Tangan  
Dengan Sabun  
di air mengalir  
atau Cairan Desinfektan



Tetap  
Jaga Jarak dan  
Jangan  
Berkerumun



Hindari  
Bersalaman  
atau Kontak Fisik  
Lainnya



Lebih Aman  
Tetap di  
Dalam Rumah